



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

# **LKIP**

**TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS SOSIAL**

**Jl. Ir. Soekarno – Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya  
Email : [dinsos@palangkaraya.go.id](mailto:dinsos@palangkaraya.go.id) – [dinassosialpraya@gmail.com](mailto:dinassosialpraya@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Palangka Raya Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun berdasarkan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada umumnya dalam mewujudkan pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*).

Palangka Raya, Desember 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PALANGKA RAYA**

**H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I   PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palangka Raya .....	3
D. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II   PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	14
C. Instrumen Pendukung .....	17
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian kinerja .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV   PENUTUP .....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2019.....	7
Tabel 1.2	Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2019.....	7
Tabel 1.3	Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2019.....	8
Tabel 1.4	Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselon Tahun 2019.....	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Program di Bidang Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	13
Tabel 2.3	ProgramPrioritas Pendukung Indikator Kinerja.....	15
Tabel 2.4	Program/Kegiatan dan Anggaran pada Indikator Kinerja Pendukung Program.....	15
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja.....	19
Tabel 3.2	Rekapitulasi PMKS yang Mandiri.....	21
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan Indikator Kinerja Program tahun 2018 dan 2019.....	28
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Tahun 2019.....	29
Tabel 3.6	Rincian SPM Bidang Sosial Tahun 2019.....	29
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	32
Tabel 3.8	Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja OPD.....	33
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian atas Penyerapan Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	34

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	6
Gambar 2.1	Website Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	17

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis terhadap program/kegiatan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Palangka Raya. Indikator kinerja sasaran menggunakan Indikator Kinerja Utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dihasilkan di tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  1. Persentase PMKS yang mandiri pada tahun 2019 sebesar 2,73%.
- 2) Sasaran 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 20,81%.
  2. Persentase PMKS yang tertangani, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 20,46%.
  3. Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 60%.
  4. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 20,81%.

5. Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 6,33%.
6. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 23,08%.
7. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 0%.
8. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 100%.
9. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar 0%.

Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya setelah perubahan di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.895.709.006,03 terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 3.358.852.372,53 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.536.856.633,50. Penyerapan dari anggaran tersebut sebesar 93,38%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk selanjutnya yaitu:

- 1) Diperlukan adanya SDM yang terampil, kreatif dan inovatif sebagai pengelola dan penghimpun data PMKS serta SDM yang sadar akan Tupoksi tugas dan fungsinya;
- 2) Walaupun capaian kinerja tahun 2019 termasuk dalam kategori baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan dan dapat memberikan hasil dan manfaat yang berkelanjutan;

- 3) Perlu adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan; dan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini semoga dapat dipergunakan sebagai perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menyusun Laporan kinerja tahun 2019 telah memuat informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2019. Penyusunan Laporan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*);

2. Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2019; dan
3. Pencapaian akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya di tahun selanjutnya; dan
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

### **a. Kedudukan Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya . Saat ini Dinas Sosial Kota Palangka Raya dipimpin oleh H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH. Sebagai salah satu satuan kerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya di bidang sosial. Adapun tugas Dinas

Sosial Kota Palangka Raya adalah Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PMKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

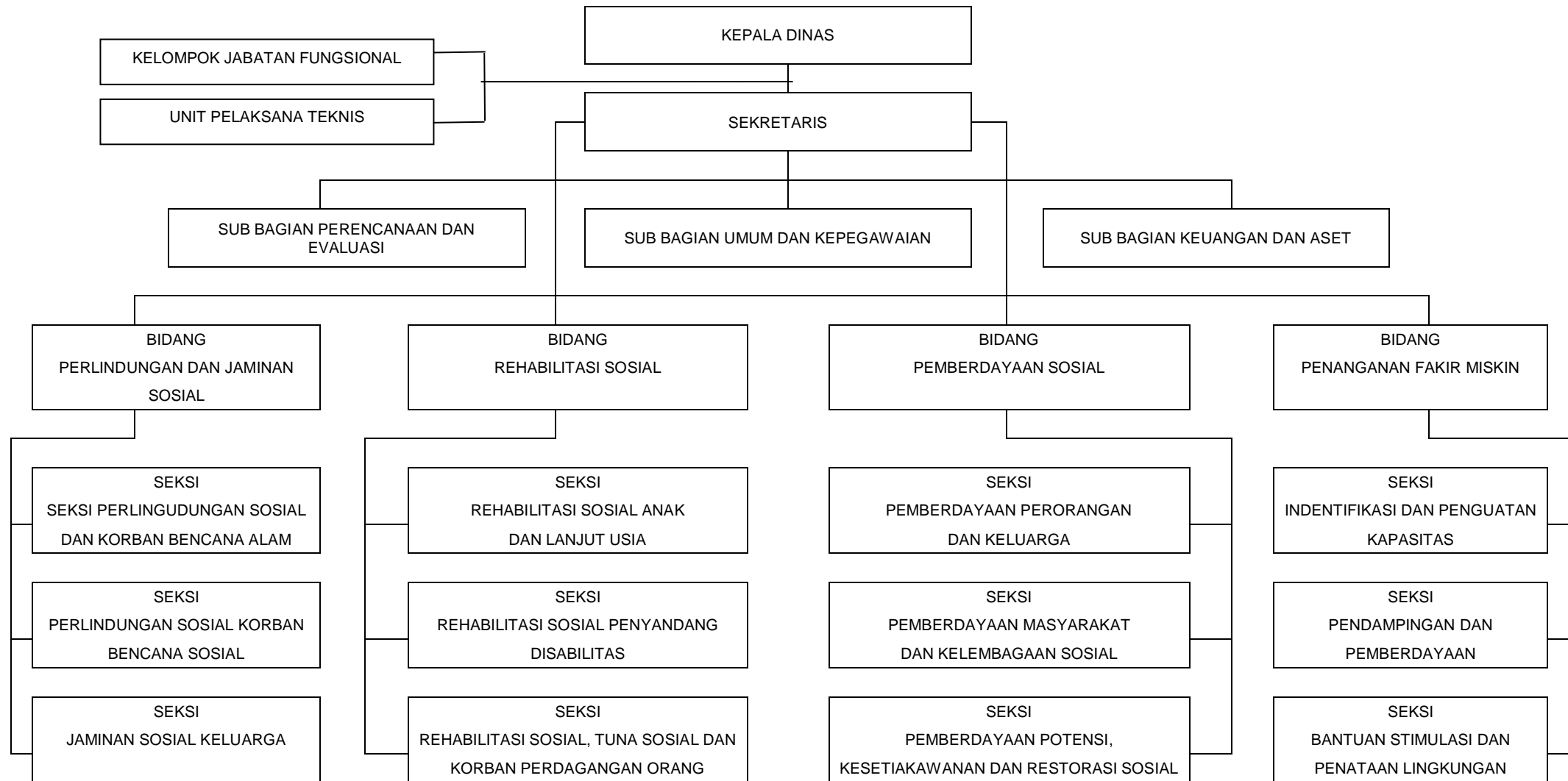
#### **c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

- c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a) Seksi Pemberdayaan Perorangan & Keluarga
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Sosial
  - c) Seksi Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial
- 5. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia
  - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang
- 6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- 7. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - b) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
  - c) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya**



**d. Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Sumber daya Manusia Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebanyak 45 orang. Berikut uraian tentang aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Golongan.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2019**

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SMU/SMU Kejuruan	5	-	5
4	Diploma I	-	-	-
5	Diploma II	-	-	-
6	Sarmud/Diploma III	3	1	4
7	Diploma IV	1	4	5
8	S1	10	14	24
9	S2	2	5	7
10	S3	-	-	-
Jumlah		21	24	45

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2019**

No	Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	-	2	2
5	Pembina	IV/a	2	4	6
6	Penata Tingkat I	III/d	5	3	8
7	Penata	III/c	6	8	14
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	-	2
9	Penata Muda	III/a	1	7	8
10	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	-	2
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-
15	Juru	I/c	-	-	-
16	Juru Muda Tingkat I	I/d	-	-	-
17	Juru Muda	I/a	-	-	-
Jumlah			21	24	45

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2019**

No	Golongan/Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	-	4
3	Golongan III	14	18	32
4	Golongan IV	3	6	9
Jumlah		21	24	45

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Aparatur Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselon Tahun 2019**

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah Jabatan			
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon II.b	1	-	1
3	Eselon III.a	-	1	1
4	Eselon III.b	2	2	4
5	Eselon IV.a	5	8	13
6	Eselon IV.b	-	-	-
Jumlah		8	11	19

**e. Program - Program Prioritas**

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut perumusan kebijaksanaan. Penetapan Program merupakan program pokok yang ditetapkan secara selektif dalam substansi strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Berikut program prioritas Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;



3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
5. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana; dan
8. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk Tahun 2019 disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019 dan dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pedoman program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun 2019. Bentuk Laporan Kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah nomor 53 Tahun 2014 perihal Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Sistematika LKIP adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2018 – 2023, merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) dan merupakan gambaran masa depan yang diinginkan masyarakat Kota Palangka Raya. Berikut visi dan misi sesuai tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya:

##### **a. VISI**

**“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA.”**

##### **b. MISI**

- 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)** Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)** Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
- 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)** Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya berada dalam Misi ke-2 (Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)) dengan Tujuan ke-3 (Mewujudkan sumberdaya

manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing) dan sasaran ke-3 (Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja).

**c. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial, maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mandiri	8223

**Tabel 2.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Program di Bidang Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Sasaran		Indikator		Target
1	Menurunnya PMKS	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100
		2	Persentase PMKS yang tertangani	8223
		3	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	55
		4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	8223
		5	Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	50
		6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5
		7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1
		8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
		9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%

## B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujudnya komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi mandat atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Men Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu melakukan penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi mandiri sehingga masalah PMKS di Kota Palangka Raya menurun. Berikut perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019:

**Tabel 2.3**  
**Program Prioritas Pendukung Indikator Kinerja**

Sasaran	Indikator	Target	Program Prioritas	Jumlah Anggaran Prioritas
Menurunnya PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri	8223	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Anak Terlantar 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	1.142.208.700,53

**Tabel 2.4**  
**Program/Kegiatan dan Anggaran pada Indikator Kinerja Pendukung Program**

Sasaran	Indikator	Target	Program/Kegiatan Pendukung
1 Menurunnya PMKS	1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
	2 Persentase PMKS yang tertangani	8223	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
	3 Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok	55	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Sasaran		Indikator	Target	Program/Kegiatan Pendukung
		usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		
	4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	8223	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidanan, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
	5	Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	50	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5	1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	-
	8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	-



### C. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Palangka Raya. Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya untuk menangkap peluang yang muncul untuk transparansi program/kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Instrumen pendukung Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

#### 1. Website Dinas Kota Palangka Raya “dinsos.palangkaraya.go.id”

Sebagai sumber informasi mengenai sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

**Gambar 2.1**  
**Website Dinas Sosial Kota Palangka Raya**



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SOPD.

Pengukuran Kinerja Kegiatan mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing kelompok Indikator Kegiatan.
2. Pengukuran pencapaian sasaran (PPS) SOPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan.

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$  Sangat Berhasil

$70 < X \leq 85$  Berhasil

$55 < X \leq 70$  Cukup Berhasil

$X \leq 55$  Tidak Berhasil

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**a. Analisis Capaian Kinerja OPD**

Dalam rangka menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya berorientasi untuk memberikan bantuan agar PMKS tersebut keluar dari kemiskinan dan dianggap sudah mampu atau sudah sejahtera. Berikut analisis capaian kinerja OPD tahun 2019:

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menurunnya PMKS	Persentase PMKS yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}} \times 100\%$	8223	242	2,73%%

Jumlah PMKS yang mandiri merupakan PMKS yang telah dinyatakan sudah mampu dan tidak memerlukan bantuan. Pada tahun 2019 terdapat 242 orang yang dinyatakan sudah mampu dan sudah sejahtera dari bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Anak Terlantar yang sudah diadopsi sedangkan jumlah PMKS yang tertangani dengan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 8.874 orang sehingga persentase realisasi sebesar 2,73%. Adapun rincian dari pengukuran kemandirian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun (pemeriksaan kandungan bagi ibu

hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbangan badan anak balita dan anak prasekolah;

- b. Komponen Pendidikan meliputi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah);
- c. Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Indikator kemandirian dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinyatakan sudah mampu/sudah sejahtera adalah keluarnya PMKS dari komponen yang telah ditetapkan atas kriteria pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

## 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai merupakan Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang diutamakan peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PMKS dan atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Indikator kemandirian untuk PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai adalah adanya kemampuan dari PMKS dalam memenuhi kebutuhan pangannya tanpa diberi bantuan.

3. Anak Terlantar yang Diadopsi

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b) Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator kemandirian untuk anak terlantar adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dengan adanya pengasuhan dari orang tua angkat.

Tabel 3.2  
Rekapitulasi PMKS yang Mandiri

No	PMKS yang Mandiri	Jumlah
1	Anak yang Diadopsi	5
2	BPNT dan PKH yang sudah mampu	237
Jumlah		242

Berikut adalah capaian sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan tahun 2019:

Tabel 3.3  
Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menurunnya PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	100	8874	20,81%
	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	8223	8723	20,46%
	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$	55	30	60%

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$	8223	8874	20,81%
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	50	289	6,33%
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$	5	6	23,08%
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$	1	0	0
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$	100%	0	0
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</b>					<b>35,93%</b>



## 1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan yang diberikan berupa alat bantu jalan bagi Penyandang Disabilitas, Asistensi, bimbingan motivasi mental dan fisik, penertiban, pemberian sembako, pendampingan psikososial, pelayanan sunatan massal dan

bantuan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan serta bantuan pangan. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2019 adalah 8.874 orang dengan perbandingan jumlah PMKS 42.640 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 20,81%. Layanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup PMKS dalam mendukung kemandirian.

## 2) Persentase PMKS yang tertangani

Kategori PMKS yang tertangani adalah masyarakat PMKS yang diberi sesuatu selain uang dan barang, misalnya pemberian pelatihan keterampilan, pengurusan administrasi, rujukan, men gantar ke RSJ dan sebagainya. Pemberian layanan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada tahun 2019 berupa bimbingan motivasi dan pendampingan bagi penyandang



Disabilitas, asistensi bagi lanjut usia, pencatatan untuk korban bencana alam dan sosial, verifikasi, validasi dan pendampingan bantuan PKH dan BPN, layanan sunatan massal, penutupan lokasi km 12, sosialisasi NAPZA serta penertiban

gelandang, pengemis, pengaman, dan tuna susila. Layanan yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 8.723 orang dengan perbandingan jumlah PMKS sebanyak 42.640 sehingga persentase capaian sebesar 20,46%. Pemberian layanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada PMKS untuk mendapatkan bantuan secara mental dan fisik agar mendapatkan kesejahteraan sosial.



**3) Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Pada tahun 2019, terealisasi bantuan KUBE kepada 30 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 10 orang setiap kelompoknya dengan perbandingan 50 KUBE yang disusulkan ke tingkat pusat sehingga persentase capaian sebesar 60%. UEP diberikan kepada KUBE dalam bentuk uang untuk mendukung profuktivitas yang dijalankan oleh KUBE.





#### 4) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan rujukan. Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan pelayanan dengan menangani sebanyak 8.874 dengan perbandingan jumlah PMKS sebanyak 42.640 sehingga persentase capaian sebesar 20,81%.



#### 5) Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial



Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-

ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan pelayanan pendampingan pada penyandang disabilitas dan ODGJ

untuk bisa mengakses kesehatan dan memberikan bantuan kepada Lanjut usia dan disabilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Terdapat 289 orang Lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terdata menerima bantuan jaminan sosial dengan perbandingan jumlah Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sebanyak 4.565 dengan persentase capaian sebesar 6,33%. Penanganan diberikan dalam bentuk uang untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan ke layanan kesehatan, bimbingan motivasi fisik dan mental, pemberian asistensi dan alat bantu jalan untuk Penyandang Disabilitas.

#### **6) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Panti sosial dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, akan dapat memberikan pelayanan



yang berkualitas. Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan 6 bantuan Sarana dan Prasarana kepada Panti Sosial yaitu: Yayasan Mamba'u Darissalam, Yayasan Roti Hidup, Yayasan Nurul Sholihin, Yayasan Al Mim, LKSA El-Ministry dan Raudhatul Jannah. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya sebanyak 26 LKS sehingga persentase capaian 23,08%.

#### **7) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**

Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkitan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriteria WKSBM adalah adanya sejumlah perkumpulan,

asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat, jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat, dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan. Pada tahun 2019, belum ada capaian WKSBM yang dicapai karena belum adanya dukungan anggaran. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bentuk implementasi pencapaian kinerja pada tahun 2019.

**8) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**



Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas



masyarakat, dan teror. Selama tahun 2019, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah memberikan bantuan kepada 509 orang yang terdampak bencana sosial dan alam dengan rincian bencana alam

sebanyak 19 orang dan bencana sosial sebanyak 490 orang dengan persentase capaian sebesar 100% karena jumlah yang ditangani adalah orang yang terdata terkena bencana alam dan sosial.

**9) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap**

Pada tahun 2019, belum terdapat korban bencana alam dan sosial yang ditangani dengan sarana dan prasarana darurat lengkap karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 masih belum terdata mengenai jumlah PMKS yang mandiri karena indikator kinerja tahun 2018 belum menghimpun tentang PMKS yang mandiri hanya ada data tentang PMKS yang diberikan bantuan. Jika perbandingan indikator kinerja program tahun 2019 dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan indikator kinerja program 2018 dan 2019**

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian %
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya	50 Kelompok	30 Kelompok	60%
Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%
panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	3 Panti	6 Panti	200%
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0	0	0
Jumlah PMKS yang mendapat bantuan kebutuhan dasar	8.500 Orang	8.874 Orang	104,4%

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Jika realisasi kinerja OPD tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2019 sebesar 6,80%, maka Dinas Sosial Kota



Palangka Raya memberikan kontribusi sebesar 40,15% terhadap target RPJMD dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Tahun 2019**

Indikator RPJMD	Target RPJMD	Indikator Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Realisasi Dinsos	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80%	Persentase PMKS yang mandiri	2,73%	40,15%

**4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Jika realisasi kinerja OPD tahun 2019 dibandingkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial tahun 2019 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai bagian dari tugas dekonsentrasi pada tingkat kabupaten/kota memberikan kontribusi yang baik dalam penanganan dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi Penyandang disabilitas, anak, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana alam dan sosial yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar. Berikut rincian SPM bidang sosial tahun 2019:

**Tabel 3.6**  
**Rincian SPM Bidang Sosial Tahun 2019**

No	Jenis PMKS	Penanganan (org)				Jumlah	Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	56	20	52	20	148	24,59%
2	Penyandang Anak Terlantar	-	56	-	-	56	11,09%
3	Penyandang Lanjut Usia Terlantar	20	107	14	-	141	3,56%
4	Gelandangan dan Pengemis	21	12	9	18	60	100%
5	Korban Bencana Alam dan Sosial	385	9	54	61	509	100%

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Faktor Pendorong atau Keberhasilan :

Berikut faktor pendorong atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja:

- Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penurunan PMKS dan meningkatkan PMKS yang mandiri diberikan bantuan dana tahun 2019 dari Kementerian Sosial RI melalui dana APBN untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan 3 kali dalam 1 tahun, Bantuan

- Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan setiap bulan, dan pemberian bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini memberikan peningkatan pada penurunan PMKS dan peningkatan PMKS yang mandiri pada tahun 2019;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial RI;
  3. Adanya dukungan dan bantuan dana dari APBN Kementerian Sosial untuk penanganan PMKS; dan
  4. Adanya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan tingkat pendapatan PMKS yang diberi bantuan.

Faktor Penghambat atau Kendala :

1. Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS;
2. Belum adanya panti yang dikelola oleh Kota Palangka Raya, karena yang ada sekarang hanya panti yang dimiliki oleh Provinsi dan swasta sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap keberhasilan pencapaian sasaran perubahan perilaku PMKS;
3. Terdapat 2 indikator kinerja program yang pada tahun 2019 ini tidak dapat terlaksanakan, yaitu:
  - a. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dikarenakan pada kegiatan tahun 2019 belum ada dukungan dan rincian program/kegiatan yang mendukung keberlangsungan indikator kinerja tersebut;
  - b. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap karena Dinas Sosial Kota

Palangka Raya tidak memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap untuk penanganan bencana alam dan sosial.

4. Minimnya sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sehingga belum dapat menunjang Indikator Utama Program pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Masih belum tersebarluaskannya tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

**Solusi :**

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dengan memaksimalkan pendataan untuk verifikasi di lapangan dan memberikan bantuan dana APBN dan APBD yang disesuaikan dengan batas maksimal kebutuhan;
- b. Diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kegiatan pemberian bantuan ke lapangan untuk memastikan bahwa PMKS yang menerima bantuan sudah atau belum dinyatakan mampu dengan adanya pemberian bantuan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
- c. Membuat strategi penyelesaian masalah terhadap kendala kegiatan agar mempercepat pencapaian kinerja; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan kementerian dan instansi terkait untuk memaksimalkan kinerja di lapangan untuk melakukan pendataan dan penginputan data dan validasi.

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Sumber Daya Aparatur :**

- a. Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas yang berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja; dan
- b. Dalam rangka pencapaian target kinerja diperlukan adanya kualitas sumber daya aparatur yang baik walaupun struktur tidak banyak tetapi fungsi dalam setiap bidang berjalan dengan maksimal.

**Sumber Dana :**

- a. Penggunaan sumber dana dari keuangan yang efisien sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja dengan memberikan output dan outcome yang memberikan manfaat dalam rangka menurunkan PMKS;
- b. Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan seefisien agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak maksimal.

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Menurunnya PMKS	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	16.746.000,53	16.444.600,00	98,20	35,93%	42,29%
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	471.130.600,00	468.664.720,00	99,48		
	Program Rehabilitasi Sosial	54.308.200,00	15.482.200,00	28,51		
	Program Pembinaan Anak Terlantar	64.606.000,00	63.674.000,00	98,56		
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	107.693.000,00	105.030.800,00	97,53		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	275.549.200,00	164.204.350,00	59,59		
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	30.612.000,00	30.612.000,00	100,00		
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	55.700.000,00	54.508.500,00	97,86		
Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran				84,97	35,93%	42,29%

Tingkat efisiensi pendanaan sebesar 42,29% karena banyaknya jumlah PMKS yang seharusnya ditangani tetapi dana untuk mendukung



penanganan PMKS tidak dapat ditangani secara keseluruhan selama setahun dan harus ditangani secara bertahap setiap tahunnya.

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahun 2019 memiliki andil besar dalam menunjang keberhasilan dan memiliki kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Berikut adalah analisis program/kegiatan prioritas penunjang pencapaian kinerja:

**Tabel 3.8**  
**Uraian Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja OPD**

Sasaran strategis	Program	Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	Pelayanan PMKS dilakukan dengan pendampingan, verifikasi, fasilitasi, bantuan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tidak ada pemulangan untuk Tuna Susila hasil dari penutupan lokalisasi di Palangka Raya
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tersedianya Pembinaan bagi Anak Terlantar	Anak terlantar diberikan bimbingan, motivasi , asistensi, pendampingan dan kebutuhan dasar lainnya
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang disabilitas mendapatkan alat bantu, penanganan rujukan, bimbingan dan asistensi serta stimulant UEP
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana,PSK,Narkoba Penyakit Sosial lainnya)	Tersedianya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidanan, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyandang penyakit sosial diberikan sosialisasi, bimbingan, penertiban dan pemberian stimulant UEP
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Memberikan sarana dan prasarana untuk Panti sosoal dalam memberikan pelayanan sosial
	Program Peningkatan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya Kesiapsiagaan Tanggap Bencana	Pemberian logistik untuk korban bencana alam dan sosial
	Program Rehabilitas dan Rekonstruksi	Tersedianya Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pendataan pada korban bencana sosial dan alam untuk diverifikasi sebelum menerima bantuan

**B. Realisasi Anggaran**

Berikut adalah uraian tentang realisasi dan capaian atas penyerapan anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019 dengan capaian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar 93,38% :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Capaian Anggaran atas Penyerapan Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019**

Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%	Sisa Dana
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.347.905.916,72</b>	<b>3.536.856.633,50</b>	<b>3.420.778.300,50</b>	<b>96,72</b>	<b>116.078.333,00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	3.347.905.916,72	3.536.856.633,50	3.420.778.300,50	96,72	116.078.333,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.078.267.372,53</b>	<b>3.358.852.372,53</b>	<b>3.018.326.513,00</b>	<b>89,86</b>	<b>340.525.859,53</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	831.014.600,00	824.110.600,00	739.762.764,00	93,31	84.347.836,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.760.000,00	98.760.000,00	82.981.027,00	84,02	15.778.973,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	379.424.600,00	301.134.200,00	237.799.168,00	78,97	63.335.032,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.250.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	100,00	0,00
Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	100,00	0,00
Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	4.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.100.000,00	190.486.400,00	190.402.569,00	99,96	83.831,00

Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%	Sisa Dana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	59.900.000,00	99,83	100.000,00
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	37.870.000,00	37.870.000,00	36.870.000,00	97,36	1.000.000,00
Penatausahaan Aset SKPD	12.530.000,00	12.530.000,00	12.480.000,00	99,60	50.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	635.610.949,00	872.895.949,00	815.171.950,00	96,46	57.723.999,00
Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	193.633.000,00	96,82	6.367.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	87.710.949,00	327.295.949,00	291.485.750,00	89,06	35.810.199,00
Pengadaan mebeleur	135.400.000,00	135.400.000,00	133.520.000,00	98,61	1.880.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	147.000.000,00	147.000.000,00	133.333.200,00	90,70	13.666.800,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.500.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00	0,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	41.867.226,00	96.867.226,00	94.325.000,00	97,28	2.542.226,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.867.226,00	41.867.226,00	40.425.000,00	96,56	1.442.226,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	55.000.000,00	53.900.000,00	98,00	1.100.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	83.000.000,00	56.250.000,00	50.036.018,00	88,95	6.213.982,00
Pendidikan dan pelatihan formal	83.000.000,00	56.250.000,00	50.036.018,00	88,95	6.213.982,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	100.350.500,00	100.350.500,00	79.047.011,00	88,55	21.303.489,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	93.047.500,00	93.047.500,00	71.744.161,00	77,10	21.303.339,00
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	7.303.000,00	7.303.000,00	7.302.850,00	100,00	150,00
<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)</b>	16.746.000,53	16.746.000,53	16.444.600,00	98,20	301.400,53

Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%	Sisa Dana
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	16.746.000,53	16.746.000,53	16.444.600,00	98,20	301.400,53
<b>PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA</b>	594.625.000,00	585.579.000,00	583.069.620,00	99,61	2.509.380,00
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	105.617.200,00	105.617.200,00	104.137.980,00	98,60	1.479.220,00
Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	73.375.000,00	66.329.000,00	66.325.500,00	99,99	3.500,00
Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	48.584.700,00	48.584.700,00	48.180.835,00	99,17	403.865,00
Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar	77.368.800,00	75.368.800,00	75.222.000,00	99,81	146.800,00
Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	48.119.400,00	48.119.400,00	48.079.400,00	99,92	40.000,00
Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni	54.774.350,00	54.774.350,00	54.774.350,00	100,00	0,00
Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin	186.785.550,00	186.785.550,00	186.349.555,00	99,77	435.995,00
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	13.308.200,00	54.308.200,00	15.482.200,00	28,51	38.826.000,00
Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	13.308.200,00	54.308.200,00	15.482.200,00	28,51	38.826.000,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR</b>	64.606.000,00	64.606.000,00	63.674.000,00	98,56	932.000,00
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	64.606.000,00	64.606.000,00	63.674.000,00	98,56	932.000,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	117.693.000,00	107.693.000,00	105.030.800,00	97,53	2.662.200,00
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	117.693.000,00	107.693.000,00	105.030.800,00	97,53	2.662.200,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT</b>	275.549.200,00	275.549.200,00	164.204.350,00	76,99	111.344.850,00

Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%	Sisa Dana
<b>SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)</b>					
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	41.999.200,00	41.999.200,00	34.299.000,00	81,67	7.700.200,00
Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, waria)	211.050.000,00	211.050.000,00	107.805.350,00	51,08	103.244.650,00
Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	22.500.000,00	22.500.000,00	22.100.000,00	98,22	400.000,00
<b>PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	212.449.197,00	212.449.197,00	211.828.700,00	99,68	620.497,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	42.789.500,00	42.789.500,00	42.486.500,00	99,29	303.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	40.115.200,00	40.115.200,00	39.815.200,00	99,25	300.000,00
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan	84.633.500,00	84.633.500,00	84.633.500,00	100,00	0,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	30.612.000,00	30.612.000,00	30.612.000,00	100,00	0,00
Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	14.298.997,00	14.298.997,00	14.281.500,00	99,88	17.497,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>	91.447.500,00	91.447.500,00	80.249.500,00	84,93	11.198.000,00
Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana	35.747.500,00	35.747.500,00	25.741.000,00	72,01	10.006.500,00
Kedaruratan Logistik	55.700.000,00	55.700.000,00	54.508.500,00	97,86	1.191.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.426.173.289,25</b>	<b>6.895.709.006,03</b>	<b>6.439.104.813,50</b>	<b>93,38</b>	<b>456.604.192,53</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Palangka Raya menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja untuk Perangkat Daerah dan 9 (Sembilan) indikator kinerja untuk program/kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Indikator Kinerja Perangkat Daerah
  1. Persentase realisasi sebesar 2,73%
- Indikator Program/Kegiatan
  1. Persentase realisasi sebesar 20,81%
  2. Persentase realisasi sebesar 20,46%
  3. Persentase realisasi sebesar 60%
  4. Persentase realisasi sebesar 20,81%
  5. Persentase realisasi sebesar 6,33%
  6. Persentase realisasi sebesar 23,08%

7. Persentase realisasi sebesar 0%
8. Persentase realisasi sebesar 100%
9. Persentase realisasi sebesar 0%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah dan program/kegiatan tersebut, sebagaimana target telah dicapai. Pada tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD Kota Palangka Raya Tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.895.709.006,03 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.439.104.813,50 dan serapan 93,38%. Dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp 456.604.192,53.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Desember 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PALANGKA RAYA**

**H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001